

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah suatu usaha ekonomi tersendiri yang dijalankan oleh perseorangan atau suatu perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, langsung atau tidak langsung berkaitan dengan suatu perusahaan kecil atau besar serta pendapatan penjualan bersih atau tahunan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ini.

4. Dunia usaha meliputi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (6) tentang usaha mikro, kecil, dan menengah berbunyi sebagai berikut:

- a. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempatnya usaha; atau
- 2) Memiliki pendapatan penjualan tahunan maksimal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki pendapatan penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki pendapatan penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam perspektif pekungannya, usaha kecil dan menengah dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok:

- 1) *Livelihood Activities*, adalah Usaha Kecil Menengah sektor informal sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang digunakan pelaku usaha. Contoh : pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, adalah Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi masih belum memiliki sifat untuk berwirausaha.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, adalah Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa berwirausaha serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, adalah Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa untuk berwirausaha serta akan melakukan pengembangan pada usahanya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut penelitian Siswanto dan Kirwani (2012), permasalahan yang umum dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- 1) Kurangnya modal

Modal merupakan salah satu faktor terpenting yang diperlukan untuk berkembangnya suatu usaha. Ketika kekurangan modal, perusahaan tidak dapat mengembangkan usahanya dengan leluasa. Oleh karena itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada umumnya merupakan usaha tertutup karena hanya mengandalkan modal pemilik usaha yang sangat terbatas. Hal ini menyulitkan badan usaha untuk memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya karena tidak mampu memenuhi persyaratan.

- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada Usaha Kecil dan Menengah mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan usaha bila dilihat dari segi pendidikan formal, pengetahuan dan keterampilan; sulit bagi perusahaan untuk berkembang secara optimal. Dampak lain dari keterbatasan kualitas SDM akan menyebabkan unit usaha tersebut akan kesulitan untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru guna meningkatkan daya saing pada produk yang dihasilkan.

3) Lemahnya jaringan usaha dan lemahnya penetrasi pasar

Umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha keluarga, mempunyai koneksi usaha yang terbatas, dan penetrasi pasar yang rendah. Apalagi jumlah produk yang dihasilkan sangat terbatas dan kualitasnya juga kurang bersaing. Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki jaringan kuat, didukung oleh teknologi, memiliki jangkauan internasional, dan memiliki kekuatan periklanan yang besar.

4) Pola Pikir Pengusaha UMKM

Semangat pengusaha UMKM dalam berwirausaha merupakan aspek penting yang sering terlupakan dalam pembahasan mengenai UMKM. Semangat mengambil risiko, tidak mudah menyerah, dan terus berinovasi merupakan semangat kewirausahaan UMKM.

5) Kurangnya Transparansi

Saat ini masih kurangnya transparansi antara pengembang UMKM generasi pertama dengan generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang masih tersembunyi dan tidak diteruskan kepada penerus perusahaan. Dampak

ini akan menimbulkan kesulitan bagi perusahaan generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

6) Tidak ada pemisahan Keuangan

Tidak ada pemisahan keuangan antara dana usaha dan dana penghidupan. Fenomena ini sering terjadi karena UMKM menganggap usahanya sebagai usaha keluarga kecil-kecilan. Kondisi ini membuat pelaku tidak pernah mengetahui berapa keuntungan yang akan dihasilkan perusahaannya serta berapa persentase laba bersihnya.

7) Menyusun Laporan Keuangan Masih Sederhana

Banyak pengelola UMKM yang masih beranggapan bahwa tidak perlu menyiapkan laporan keuangan sederhana sebagai bahan analisis kegiatan usaha. Palsunya yang penting adalah apakah uang yang dijual hari ini bisa dijadikan modal lagi keesokan harinya. Jika tidak mengurus masalah keuangan kecil sejak awal, bisnis tidak akan berkembang dalam jangka panjang. Pengelolaan keuangan menjadi terganggu ketika pelaku UMKM terlibat dalam hubungan utang komersial dan utang kepada lembaga keuangan. Adanya utang mengandung arti suatu kewajiban yang besarnya dan jangka waktunya ditetapkan untuk pemenuhannya. Gagal memenuhi kewajiban ini bahkan lebih buruk daripada tidak mampu memisahkan dana bisnis dari dana sehari-hari.

2.1.2 Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 Paragraf 10 (2012) Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan yaitu representasi struktural dari kinerja keuangan suatu perusahaan.

Laporan keuangan memuat informasi tentang suatu perusahaan, termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk laba dan rugi, kontribusi dan distribusi dari pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Dengan adanya informasi mengenai suatu perusahaan, laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi (IAI: 2012).

Laporan keuangan merupakan keadaan keuangan suatu perusahaan saat ini atau periode waktu tertentu. Laporan keuangan juga merupakan kewajiban semua perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keadaan keuangannya untuk jangka waktu tertentu. Informasi yang dilaporkan dianalisis untuk memahami situasi dan posisi perusahaan saat ini. Laporan keuangan kemudian juga menentukan tindakan apa yang akan diambil perusahaan saat ini dan di masa depan dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang ada, baik kelemahan maupun kelebihanannya (Kasmir, 2012: 7).

Setiap laporan mempunyai komponen keuangan tersendiri, seperti maksud dan tujuannya masing-masing. Lengkap atau tidaknya penyampaian laporan tergantung pada keadaan perusahaan dan kesediaan manajemen untuk menyajikannya. Selanjutnya pemenuhan kepentingan pihak lain juga tergantung pada kebutuhan dan tujuan perusahaan (Kasmir, 2012: 10). Sekali lagi, laporan sekuritas menunjukkan situasi keuangan suatu perusahaan dan memudahkan manajer untuk mengevaluasi kinerja bisnis suatu perusahaan. Penilaian kinerja merupakan ukuran atau ukuran mampu atau tidaknya manajemen dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan (Kasmir, 2012: 10).

2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah merupakan standar yang dirancang khusus sebagai acuan standar akuntansi keuangan untuk usaha kecil dan menengah. SAK EMKM adalah standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), menggantikan SAK ETAP (entitas tanpa akuntan publik bersertifikat) dan berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Adanya SAK EMKM yang memuat peraturan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP akan mempermudah UMKM membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan memudahkan pembiayaan bagi pelaku UMKM (IAI, 2016).

Menurut SAK EMKM (2016: 4), pengakuan unsur neraca adalah proses penetapan pos-pos neraca atau laporan laba rugi yang sesuai dengan definisi unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dapat dipastikan bahwa kegunaan ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari entitas.

Penilaian tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan didasarkan pada bukti mengenai kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan saat laporan keuangan disusun. Penilaian dilakukan secara individual terhadap item-item yang penting secara *personal* dan secara berkelompok dari populasi yang besar untuk item-item yang secara individual tidak penting (SAK EMKM, 2016: 4).

b. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dalam banyak kasus, biaya suatu pos dapat diukur secara andal. Dalam kasus lain, perlu memperkirakan estimasi biaya. Jika penilaian yang tepat tidak memungkinkan, maka tidak akan ada pengungkapan akuntansi dalam neraca atau laba rugi (SAK EMKM, 2016: 4).

Proses penetapan nominal total uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan disebut pengukuran. Biaya historis adalah dasar pengukuran dalam unsur laporan keuangan dan merupakan jumlah kas dan setara kas yang dibayar guna mendapatkan aset saat perolehan. Biaya historis liabilitas ialah sebesar total kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal (SAK EMKM, 2016: 5). Agar laporan keuangan yang disajikan akurat dan mudah dipahami, harus dibuat asumsi dasar akuntansi. Beberapa asumsi dasar akuntansi berdasarkan SAK EMKM adalah:

1) Akuntansi Akrua Basis

Akuntansi akrual oleh perusahaan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dicatat berdasarkan basis akrual jika definisi dan kriteria pengakuan masing-masing akun terpenuhi. Menurut Suwardjono (2014), akuntansi akrual adalah dasar pengakuan pendapatan dan beban, dimana pendapatan diakui dan muncul kewajiban saat ada hak suatu entitas akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak ketiga dan pengakuan biaya saat kewajiban muncul dikarenakan sumber ekonomik yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan tersebut.

2) Kelangsungan Usaha

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen mengevaluasi kemampuan perusahaan di masa depan untuk melanjutkan usaha (*going concern*).

3) Konsep Entitas Bisnis

Dalam menyusun laporan keuangan, unit harus didasarkan pada konsep unit usaha. Badan usaha tersebut harus dipisahkan secara jelas dengan pemberi kerja atau badan usaha lainnya. Baik itu usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum.

Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP salah satunya terletak pada unsur laporan keuangannya. SAK EMKM Bab 3 Pasal 9 menyatakan bahwa unsur-unsur laporan keuangan paling sedikit terdiri dari tiga unsur: (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan laba rugi, dan (3) catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan pengelolaan keuangan adalah laporan yang disusun dengan cara sistematis dari tingkat aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (Syam, 2014). Posisi keuangan suatu perusahaan berdasarkan bab 2 paragraf 2. SAK EMKM terdiri dari informasi yang disajikan dalam neraca dan didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset.

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Menurut Suhayati dan Anggadini (2015), aset merupakan barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai moneter. Pos-pos laporan

pengelolaan keuangan SAK EMKM terdiri dari (1) kas dan setara kas, (2) piutang, (3) persediaan, dan (4) aset tetap.

b. Liabilitas atau Kewajiban

Liabilitas merupakan kewajiban perusahaan saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang pemenuhannya menghabiskan sumber daya perusahaan yang mewakili manfaat ekonomi. Pos-pos yang termasuk dalam utang adalah (1) utang usaha dan (2) utang bank.

c. Ekuitas.

Ekuitas adalah sisa setelah aset perusahaan dikurangi dengan seluruh kewajiban.

Gambar 2.1 laporan posisi keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
ASET	Catatan	20x8	20x7
ASET			
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Sumber: ED SAK EMKM

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memberikan informasi hasil usaha suatu perusahaan selama suatu periode berupa selisih antara pendapatan dan beban. Kinerja keuangan suatu perusahaan terdiri dari informasi yang muncul pada laporan laba rugi. Menurut SAK EMKM Bab 2 Pasal 8, unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

a. Penghasilan.

Penghasilan merupakan peningkatan laba selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan modal yang bukan berasal dari penanaman modal. Menurut Suhayati dan Anggadini (2015), pendapatan adalah total pertambahan modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang, pemberian jasa kepada pelanggan atau klien, penyewaan real estat, peminjaman dana, serta kegiatan bisnis dan professional untuk menghasilkan pendapatan.

b. Beban.

Beban yaitu pengurangan laba selama periode pelaporan berupa arus kas keluar atau penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan berkurangnya modal yang bukan disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Beban ialah biaya selama proses menghasilkan pendapatan (Suhayati dan Anggadini, 2015). Pos yang mencakup beban pajak dan keuangan terdapat di laporan laba rugi.

Gambar 2.2 laporan laba rugi yang sesuai dengan SAK EMKM

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
PENDAPATAN	Catatan	20x8	20x7
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber: ED SAK EMKM

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan catatan penjelasan jumlah yang dilaporkan dalam neraca dan laporan laba rugi, serta informasi tambahan seperti kewajiban dan komitmen yang sedang berjalan (Syam, 2014).

SAK EMKM Catatan atas laporan keuangan pada Bab 6 Bagian 2 ini memuat tambahan dan rincian mengenai hal-hal tertentu yang terkait, antara lain:

- a. Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- c. Informasi tambahan dan rincian mengenai pos-pos spesifik yang menggambarkan transaksi penting dan signifikan untuk membantu pengguna memahami laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM Bab 2 Pasal 12 disebutkan bahwa pengakuan unsur-unsur laporan keuangan adalah proses pembuatan akun-akun dalam neraca atau laporan laba rugi sesuai dengan unsur dan kriteria sebagai berikut:

- a. Dapat dipastikan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam atau keluar entitas; dan
- b. Akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur secara andal.

Pengakuan dalam laporan keuangan menurut SAK EMKM adalah sebagai berikut:

1) Aset

Pengakuan aset di sebuah laporan posisi keuangan terjadi apabila di masa yang akan datang manfaat ekonominya mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut dapat diukur secara andal melalui biaya yang dimilikinya.

2) Kewajiban

Kewajiban diakui di neraca bila manfaat ekonomi yang termasuk dalam pengeluaran sumber daya dapat digunakan secara andal dalam jumlah terukur untuk memenuhi kewajiban perusahaan.

3) Pendapatan

Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi bila peningkatan manfaat ekonomi masa depan dikaitkan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas dan dapat diukur dengan andal.

4) Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi bila beban tersebut mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas dan dapat diukur dengan andal.

Kemudian dalam mengukur SAK EMKM bab 2 paragraf 15-16 berisi proses penetapan nominal uang guna mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan merupakan pengukuran. Dasar pengukuran unsur keuangan adalah menggunakan biaya historis. Dalam suatu aset, biaya historis merupakan sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan dalam suatu liabilitas, biaya historis merupakan sejumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Laporan keuangan SAK EMKM menyatakan pada Bab 3 Ayat 2 bahwa penyajian wajar mensyaratkan penyajian yang jujur mengenai dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, dan pendapatan. yang ada.

Hal-hal yang harus dipenuhi entitas dalam penyajian wajar laporan keuangan bertujuan untuk mencapai tujuan:

a. Relevan

Informasi dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh pengguna. Kemampuan suatu informasi dalam membantu pengguna menyusun peristiwa ekonomi juga dapat dikatakan relevan.

b. Representasi Tepat atau Penyajian Akurat

Informasi dalam laporan keuangan mencerminkan secara akurat apa yang disajikan dan bebas dari kesalahan atau distorsi yang material.

c. Keterbandingan:

Informasi di laporan keuangan suatu perusahaan dapat dibandingkan antar periode untuk mengetahui kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

d. Kemudahan Pemahaman

Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna.

Gambar 2.3 catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7	
1. UMUM	Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	
a. Pernyataan Kepatuhan	Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.
b. Dasar Penyusunan	Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.
c. Piutang usaha	Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.
d. Persediaan	Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i> . <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.
e. Aset Tetap	Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7		
f. Pengakuan Pendapatan dan Beban	Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.	
g. Pajak Penghasilan	Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.	
3. KAS	20x8	20x7
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx
4. GIRO	20x8	20x7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
5. DEPOSITO	20x8	20x7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga Deposito:		
Rupiah	20x8 4,50%	20x7 5,00%
6. PIUTANG USAHA	20x8	20x7
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

ENTITAS		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7		
7.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	
		<u>20x8</u> <u>20x7</u>
	Sewa	xxx xxx
	Asuransi	xxx xxx
	Lisensi dan perizinan	xxx xxx
	Jumlah	xxx xxx
8.	UTANG BANK	
	Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.	
9.	SALDO LABA	
	Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.	
10.	PENDAPATAN PENJUALAN	
		<u>20x8</u> <u>20x7</u>
	Penjualan	xxx xxx
	Retur penjualan	xxx xxx
	Jumlah	xxx xxx
11.	BEBAN LAIN-LAIN	
		<u>20x8</u> <u>20x7</u>
	Bunga pinjaman	xxx xxx
	Lain-lain	xxx xxx
	Jumlah	xxx xxx
12.	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
		<u>20x8</u> <u>20x7</u>
	Pajak penghasilan	xxx xxx

Sumber: ED SAK EMKM

2.1.4 Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran bagi peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi kekuatan spiritual dan kontrol diri. Kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemampuan yang dibutuhkan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tingkat pendidikan merupakan tingkat atau fase sekolah yang diambil tergantung dari siswa, tujuan yang ingin dicapai, dan kapasitas yang akan diciptakan oleh seseorang melalui pendidikan formal maupun nonformal (Parhusip dan Herawati, 2020). Nurdwijayanti & Sulastiningsih (2018) mengungkapkan bahwa Tingkat pendidikan yaitu tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh pemilik UMKM. Tingkat pendidikan formal dimulai SD, SMP sederajat, SMA sederajat, diploma,

sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Pentingnya tingkat pendidikan yaitu untuk menghadapi tantangan global.

Diana (2018) mengungkapkan tingkat pendidikan yaitu tingkatan terakhir yang dilalui oleh responden seperti lulusan SMA/SMK, S1, S2, persepsi mengenai pentingnya pembukuan usaha juga dapat digambarkan dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang telah ditempuh dan dimiliki oleh seseorang pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh kinerja yang baik (Arismawati et al. 2017). Pelaksanaan SAK EMKM juga dipengaruhi oleh tingkat pelatihan itu sendiri. Kapasitas dan kemampuan pelaku organisasi menengah atau kecil saat ini masih terlihat dari pendidikan yang telah diambil, baik formal maupun nonformal (Kusuma dan Lutfiany, 2019).

2.1.5 Pemahaman Akuntansi

IAI (2016) menyatakan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*). Akuntansi menghasilkan informasi yang mewakili kinerja keuangan entitas selama periode tertentu dan status keuangannya pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi digunakan oleh pengguna untuk membantu peramalan kinerja masa depan. Menurut Agoes (2012) akuntansi adalah suatu sistem dengan input dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang berharga bagi pengguna internal dan eksternal entitas. Sebagai suatu sistem, akuntansi terdiri dari transaksi sebagai input, aktivitas untuk meringkas transaksi sebagai proses, dan laporan keuangan sebagai output. Seseorang yang mengetahui akuntansi memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana proses akuntansi dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan standar laporan keuangan tahunan SAK EMKM.

Menurut Rizky (2012), laporan keuangan adalah laporan termasuk data keuangan tentang suatu organisasi. Informasi keuangan terdiri dari situasi keuangan entitas dan kinerja keuangan. Korporasi merilis laporan keuangan, yang merupakan produk dari proses akuntansi dan termasuk data keuangan yang dimaksudkan untuk memberi tahu pihak luar. Menurut IAI (2016), Standar Akuntansi Keuangan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan UMKM dalam hal pelaporan keuangan. SAK EMKM memiliki prosedur akuntansi yang lebih sederhana daripada SAK ETAP karena Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah hanya menggunakan biaya historis untuk mengelola transaksi umum dan dasar pengukuran.

Pemahaman akuntansi ialah kegiatan memahami pembukuan dan proses pelaporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini. Menurut Auliah dan Kaukab (2019) pelaku UMKM agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar, sebaiknya disusun oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam memahami akuntansi. Pemahaman tentang akuntansi khususnya laporan keuangan bagi pelaku UMKM masih sangat rendah, sehingga belum merasakan manfaat dari penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Kecerdasan emosional diproksikan oleh variabel pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi (Wahyuni & Nababan, 2007).

2.1.6 Sosialisasi SAK EMKM

Sosialisasi merupakan proses komunikasi interaktif yang melibatkan perkembangan seseorang dari semua informasi dan dinamika pengaruh sosial (Obeng et al., 2019). Sosialisasi bertujuan mewujudkan kemampuan taat urgensi norma dan cita-cita sosial dan dalam nilai-nilai budaya kelompok di mana manusia berada juga dapat terwujud. Sosialisasi merupakan proses munculnya terbentuk dan berkembangnya kepribadian manusia dalam ketergantungan dan interaksi dengan manusia serta kondisi kehidupan sosial pada waktu tertentu (Obeng et al., 2019)

Sosialisasi SAK EMKM bisa didapatkan melalui dinas terkait kepada pelaku UMKM (Parhusip dan Herawati, 2020). Dalam mencapai sesuatu yang diinginkan dari sosialisasi, pelaksanaannya harus sesuai dengan kebutuhan UMKM dan harus memiliki tujuan diadakannya sosialisasi, dengan begitu dapat memperoleh manfaat yang dibutuhkan UMKM dengan memperhatikan media yang sesuai agar tepat sasaran (Kusuma dan Lutfiany, 2019).

SAK EMKM merupakan pedoman bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan karena dianggap lebih sederhana dan mudah diterapkan dalam penerapan pedoman pentingnya pelaporan keuangan pada suatu perusahaan, khususnya bagi pemangku kepentingan UMKM, Namun, hal ini tidak mudah diterapkan oleh usaha kecil dan menengah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi, sehingga pemahaman SAK EMKM masih kurang (Hamdani et al. 2020).

Menurut Wulandari et al. (2020), sosialisasi SAK EMKM diartikan sebagai sosialisasi yang berasal dari hubungan interpersonal dan sumber eksternal untuk

melakukan tindakan tertentu yang dapat memberikan pengaruh dan tekanan sosial kepada pelaku UMKM serta merupakan faktor normatif subjektif yang mengacu pada lingkungan sosial. tekanan dan pengaruh sosial. Penyuluhan dan pelatihan SAK EMKM sangat dibutuhkan oleh UMKM, karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan diharapkan bekerjasama dengan kelurahan atau dinas terkait.

2.2 Penelitian Sebelumnya

2.2.1. Tabel Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andari et al. (2022)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Ukuran Usaha dan Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, ukuran usaha, dan sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat.
2.	Susilowati et al. (2021)	Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Persepsi Pelaku UMKM, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Penerapan SAK EMKM pada Laporan Keuangan UMKM di Kota Surabaya	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM, persepsi pelaku UMKM, dan pemahaman akuntansi secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM.

3.	Mutiar dan Yudiantara (2021)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi, dan Penerapan Akuntansi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM	Hasil yang diperoleh variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan penerapan akuntansi berpengaruh secara positif terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM (Y).
4.	Larasati dan Farida (2021)	Pengaruh Sosialisai, Pemahaman atas Laporan Keuangan dan Tingkat Pendidikan Pelaku UKM terhadap Penerapan SAK EMKM pada UKM di Kabupaten Kebumen	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman atas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM pada UKM di Kabupaten Kebumen, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UKM di Kabupaten Kebumen.
5.	Adryanta dan Rita (2020)	Pemahaman SAK EMKM, Sosialisasi Laporan Keuangan dan Penerapan SAK EMKM dengan Modeasi Ukuran Usaha	Hasil penelitian ini yaitu : 1. Pemahaman SAK EMKM tidak terbukti secara signifikan memengaruhi penerapan SAK EMKM. 2. Sosialisasi laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. 3. Ukuran usaha tidak memoderasi pemahaman SAK EMKM terhadap penerapan SAK EMKM.
6.	Rahma Auliah & Kaukab (2019)	Pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP (Studi kasus pada UMKM di kabupaten Wonosobo).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Tingkat pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP. 2. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan UMKM.

7.	Febriyanti dan Wardhani (2018)	Pengaruh Persepsi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Wilayah Kota Surabaya	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM, namun sosialisasi dan juga tingkat pendidikan tidak terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap penerapan SAK EMKM.
8.	Hendrawati (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)	Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, masa memimpin perusahaan, skala usaha dan pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hasil uji secara parsial menunjukkan jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, masa memimpin perusahaan dan skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi, sedangkan pengetahuan akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi.

2.2.2. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini merupakan replikasi konseptual dari penelitian Mutiari dan Yudiantara (2021) yang meneliti Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi dan Penerapan Akuntansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mutiari dan Yudiantara (2021) terletak pada lokasi penelitian, yaitu pada penelitian Mutiari dan Yudiantara (2021) terletak di Kabupaten Buleleng sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sawahan.

2.3 Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1. Hipotesis

Sugiyono (2019) mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

Saat membuat laporan keuangan, seseorang mengalami permasalahan (Mutiar dan Yudiantara, 2021). Menurut Rudiantoro dan Siregar (2012), terdapat faktor yang mempengaruhi pandangan dan persepsi pemangku kepentingan usaha mengenai pentingnya pelaporan keuangan dalam pengembangan usaha, yaitu tingkat pendidikan dan latar belakang akademis. Tergantung pada tingkat pendidikan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut Larasati dan Farida (2021) semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki pelaku UKM maka akan lebih sulit dalam memahami dan menerapkan SAK EMKM, sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan pelaku UKM maka akan semakin mudah dalam menerapkan SAK EMKM untuk usahanya. Tingkat Pendidikan seseorang yang lebih tinggi akan berpengaruh kepada kemampuan seseorang tersebut untuk menyerap informasi mengenai penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai SAK EMKM serta dapat menerapkannya. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan bahwa :

H1 : Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

Paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pandai atau mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Mutiari dan Yudiantara (2021) pemahaman akuntansi adalah upaya untuk memahami pengetahuan akuntansi, termasuk pembukuan dan proses pelaporan keuangan yang berpedoman atau berkaitan dengan prinsip dan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan yang berlaku saat ini.

Menurut Rahma Auliah & Kaukab (2019) semakin seseorang memiliki pemahaman akuntansi maka akan semakin meningkatkan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Seseorang yang memiliki pengetahuan akuntansi pasti akan memiliki pengetahuan akuntansi yang lebih tinggi, seperti penyusunan laporan keuangan dan ilmu tentang SAK EMKM, dibandingkan seseorang yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan bahwa :

H2 : Pemahaman akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

3. Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

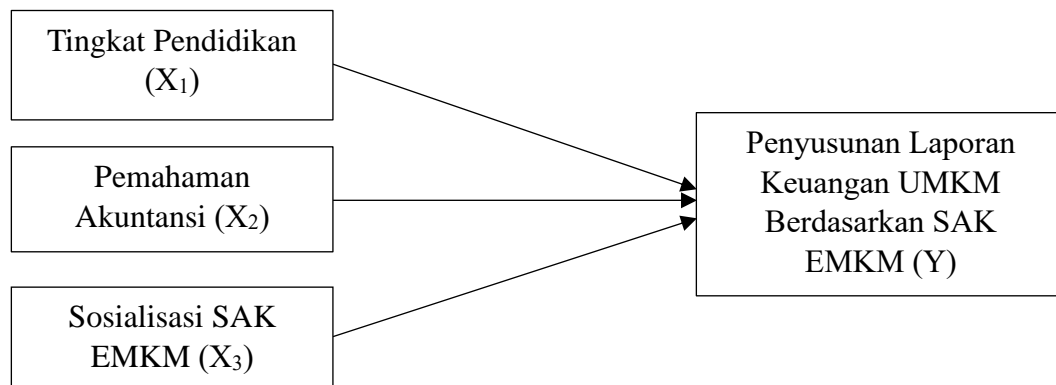
Menurut Larasati dan Farida (2021), Perusahaan kecil dan menengah yang belum sepenuhnya memahami aturan SAK EMKM akan merasakan manfaat dari adanya asosiasi tersebut dan akan lebih mudah menerapkan SAK EMKM saat menyusun laporan keuangan. Informasi yang diperoleh seseorang dengan adanya

sosialisasi penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM akan menjadikan dasar pengetahuan untuk menerapkannya di UMKM yang sedang dijalankan. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan bahwa :

H3 : Sosialisasi SAK EMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

2.3.2. Model Analisis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, terdapat beberapa variabel-variabel yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Sosialisasi SAK EMKM. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran sistematis:



Gambar 2.4 Model Analisis